

Dewan Trenggalek Ingatkan Eksekutif Terkait SDM Pejabat

Agus Riyanto - TRENGGALEK.INDONESIASATU.CO.ID

Aug 25, 2021 - 20:27



Suasana rapat kerja Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek bersama OPD mitra

Trenggalek - DPRD Kabupaten Trenggalek melalui Komisi I menggelar rapat kerja bersama beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan topik bahasan, yakni Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan tahun 2021, Rabu (25/8/2021).

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek Husni Tahir Hamid mengatakan, dalam pembahasan KUA PPAS Perubahan tahun 2021 pihaknya meminta agar setiap OPD cermat dalam menganggarkan. Sehingga tidak terjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa).

"Kami berharap agar kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi atensi Bupati. Agar bisa menjalankan tugasnya sesuai bidang masing - masing, " ucapnya kepada wartawan.

Husni menuturkan, salah penyebab tingginya Silpa adalah faktor SDM di masing - masing OPD kurang bisa memaksimalkan dalam proses pelaksanaan kegiatan..

" Selain itu semua juga bisa disebabkan tidak adanya pengawasan dalam perencanaan, " tandasnya.

Husni tidak menampik jika pihaknya telah mengingatkan eksekutif agar anggaran yang tidak bisa terserap segera dialihkan ke kegiatan lain. Agar visi misi Bupati bisa terealisasi sesuai target.

Jika saja program tidak terlaksana, masih lanjut Husni, bisa diartikan visi misi Bupati tidak akan tercapai, sebab visi misi itu bisa terlaksana apabila ada anggarannya.

" Sekarang ini sudah masuk ke APBD Perubahan, jadi masih ada waktu untuk memaksimalkan dalam membuat sebuah perencanaan, " imbuhnya.

Politisi dari Partai Hanura ini berharap agar Pemkab mengawal, misal dalam perencanaan kegiatan di tahun 2021 lalu, tahun 2020 semua menganggap jika wabah pandemi Covid - 19 akan usai. Semua menganggarkan secara normal seperti biasanya.

Dari situ tidak ada antisipasi adanya Covid - 19, sehingga banyak program - program yang tidak terealisasi. Misalnya perjalanan dinas yang anggarannya tidak terserap.

" Itu seharusnya bisa dialihkan ke kegiatan atau program lain, " ungkapnyanya.

Untuk itu, dia berpendapat jika Bupati harus lebih selektif dalam mengevaluasi pemilihan SDM. Jadi dia bisa kerja apa tidak.

" Jangan sampai pegawai atau pejabat apa tugas mereka, " tutupnya (ags).